



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi untuk dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis perlu mempertimbangkan, memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam satu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Skala Prioritas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 09 September 2019

KETUA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DIDIT SRI GUSJAYA

LAMPIRAN:KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020.

NOMOR : /DPRD/2019

TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2019

I. ADAPUN USULAN DARI DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG MELIPUTI:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS ANAK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
SISTEM RESI GUDANG.
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
GIOLOGI.
5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PROVINSI
WISATA.
6. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN.

II. USULAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG MELIPUTI:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2017-2022.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG.

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2014-2034.
5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN.
6. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
7. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.
8. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA.
9. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. JAMKRIDA BABEL.
10. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. BANK SYARIAH BANGKA BELITUNG.
11. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BABEL GLOBAL INVESMENT.

KETUA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DIDIT SRI GUSJAYA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2020

SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2020

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	USULAN	SKALA PRIORITAS	MASA SIDANG PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2017-2022	Gubernur	1	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.	Gubernur	2	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
3.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Gubernur	3	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
4.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2014-2034	Gubernur	4	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II

5.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN	Gubernur	5	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
6.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	DPRD	6	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
7.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS ANAK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DPRD	7	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
8.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG	DPRD	8	Masa Sidang 1 s.d. Masa sidang II
9.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	Gubernur	9	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
10.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.	Gubernur	10	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III

11.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA	Gubernur	11	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
12.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. JAMKRIDA BABEL	Gubernur	12	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
13.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA PT. BANK SYARIAH BANGKA BELITUNG	Gubernur	13	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
14.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BABEL GLOBAL INVESMENT	Gubernur	14	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
15	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN	DPRD	15	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
16.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	DPRD	16	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III

17.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS ANAK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DPRD	17	Masa Sidang II s.d. Masa sidang III
-----	--	------	----	-------------------------------------

NO	DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG APBD TAHUN 2021.
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2020.
3.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019

KETUA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DIDIT SRI GUSJAYA

